

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah diarahkan terutama pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan daerah tentunya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Sasaran

---

<sup>2</sup> Teddy Christianto Leasiwal, "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Maluku", *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, Vol. VII, No. 2, 2013, hal 169-303, dalam <http://ejournal.unpatti.ac.id>. diakses 15 Desember 2019.

pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.<sup>3</sup>

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.<sup>4</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.<sup>5</sup> Karena dirasa masih menjadi permasalahan yang cukup serius, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang masih kekurangan bahan

---

<sup>3</sup> Dermoredjo, "Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan" *Jurnal Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, 2003, hal 291-324, dalam <http://www.lpem.org>, diakses 15 Desember 2019.

<sup>4</sup> Ali Khomsan, et. al., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6.

<sup>5</sup> T. Iskandar Ben Hasan dan Zikriah, "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penduduk Miskin di Aceh", *Jurnal SAINS*, Vol. 1 No. 1, 2012, hal. 1-5, dalam <http://ejournal.unigha.ac.id>, diakses 8 September 2019.

makanan, sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dan masih banyak masyarakat menjadi pengangguran. Ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat

**Tabel 1.1**  
**Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2011 – 2018 (persen)**

No	Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	DI Yogyakarta	16.14	15.88	15.03	14.55	13.16	13.01	12.36	11.81
2	Jawa Tengah	16.21	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23	11.19
3	<b>Jawa Timur</b>	<b>14.27</b>	<b>13.40</b>	<b>12.55</b>	<b>12.42</b>	<b>12.34</b>	<b>12.05</b>	<b>11.77</b>	<b>10.98</b>
4	Jawa Barat	10.57	9.88	9.61	9.18	9.57	8.77	7.83	7.25
5	Banten	6.26	5.71	5.89	5.51	5.75	5.36	5.59	5.25
6	DKI Jakarta	3.64	3.70	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78	3.55

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic BPS  
Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, bila dibandingkan dengan lima provinsi lain di pulau jawa, rata – rata tingkat kemiskinan Jawa Timur berada di posisi ketiga dibawah Jawa Tengah. Berbagai kebijakan dan program - program telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan dan belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dapat dilihat persentase penduduk miskin antar provinsi di Pulau Jawa terlihat mengalami penurunan jumlahnya sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang berdekatan dengan Provinsi Jawa Timur yaitu Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. Persentase penduduk miskin antar Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2011 sampai tahun

2018 menunjukkan angka yang berfluktuasi, namun ada kecenderungan yang semakin menurun.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Jawa Timur**  
**Tahun 2011-2018**

<b>Tahun 2011 - 2018</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2011	5.388,97	14.27
2012	5.099,01	13.40
2013	4.805,01	12.55
2014	4.786,79	12.42
2015	4.789,12	12.34
2016	4.703,30	12.05
2017	4.617,01	11.77
2018	4.332,59	10.98

*Sumber/Source: Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa Jumlah penduduk miskin Jatim pada Tahun 2013 tercatat 4.805,01 ribu jiwa, sebelumnya di tahun 2012, tercatat 5.099,01 atau 13,40 persen dari total penduduk Jawa Timur. Dari tahun 2011 sampai 2018 selalu mengalami penurunan, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen), berkurang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2017 yang sebesar 4.617,01 ribu jiwa (11,77 persen). Persentase penduduk miskin di Tahun 2015 sebesar 12,34 persen turun menjadi 12,05 persen pada Tahun 2016. Sementara persentase penduduk miskin Tahun 2013 sebesar 12,55 persen turun menjadi 12,42 persen pada 2014.

Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, Pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi,

perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual dan penyegaran kehidupan budaya.<sup>6</sup>

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi, Menurut Kuznet, sebagaimana dikutip oleh Tambunan, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan, dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2007), hal. 1.

<sup>7</sup> Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2009), hal. 23.

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar**  
**Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur (persen)**  
**Tahun 2011-2018**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Nasional</b>
2011	6.44	6,35
2012	6.44	6,23
2013	6.08	5,78
2014	5.86	5,02
2015	5.44	4,79
2016	5.55	5,02
2017	5.45	5,07
2018	5.48	5,17

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif Jawa Timur Tahun 2015 mencapai 5,44 persen sedikit melambat dibanding tahun 2014 sebesar 5,86 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,65 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional (4,79 persen). Dengan begitu, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap (Nasional) sebesar 14,36 persen. Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang berfluktuatif dari tahun ke tahun tetapi mengalami trend yang positif berarti disaat PDRB meningkat dibarengi menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur.

Pendapatan perkapita sering kali digunakan sebagai indikator pembangunan, selain untuk membedakan tingkat kemajuan antar negara maju dan berkembang. Dengan perkataan lain, pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat

diberbagai negara juga dapat menggambarkan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diberbagai negara.<sup>8</sup> Pendapatan perkapita dapat diperoleh dengan menurunkan nilai PDRB yang dibagi dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi atas tahun dasar.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas kerja yang rendah berakibat pada

---

<sup>8</sup> Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, Ed IV, 2006). *Ekonomi Pembangunan*, hal 4.

rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

Menurut Todaro, sebagaimana dikutip oleh Triariani mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

**Tabel 1.4**  
**Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur**  
**Tahun 2011 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Harapan Hidup (tahun)</b>	<b>Rata – Rata Lama Sekolah (tahun)</b>	<b>Harapan Lama Sekolah (tahun)</b>	<b>Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah)</b>	<b>IPM (persen)</b>
2011	70.02	6.79	11.62	9.396	66.06
2012	70.14	6.85	11.74	9.797	66.74
2013	70.34	6.90	12.17	9.978	67.55
2014	70.45	7.05	12.45	10.012	68.14
2015	70.68	7.14	12.66	10.383	68.95
2016	70.74	7.23	12.98	10.715	69.74
2017	70.80	7.34	13.09	10.973	70.27
2018	70.97	7.39	13.10	11.380	70.77

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa IPM Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2018. Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang mengembirakan.

---

<sup>9</sup>Endah Ernany Triariani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 5, 2013, dalam <http://journal.feb.unmul.ac.id>. diakses 8 September 2019.

Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2016 sebesar 69,74 meningkat terus tiap tahun, hingga mencapai 70,27 pada tahun 2017. Pada tahun 2018, angka IPM Jawa Timur meningkat kembali menjadi 70,77 (angka sangat sementara). Meningkatnya IPM ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur.

Peningkatan IPM setiap tahunnya menyebabkan naiknya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas naik berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur turun dari tahun 2011 hingga 2018. Apabila IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Jika kesejahteraan meningkat tingkat kemiskinan menjadi berkurang. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga harus didukung oleh pembangunan manusia, yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu suatu ukuran komposit yang mencerminkan tidak hanya pendapatan, tapi juga harapan hidup dan pencapaian dibidang pendidikan.<sup>10</sup> IPM dihitung dengan mencakup tiga komponen, yaitu peluang hidup (*Longevity*), pengetahuan (*Knowledge*), dan standar hidup layak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Sukirno, bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat

---

<sup>10</sup> UNDP. *Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Indonesia Laporan Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, Bappenas, 2001),hal 3

mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun senantiasa mengalami pertumbuhan.<sup>11</sup>

Pertumbuhan penduduk ini cenderung akan mengakibatkan juga pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan Kerja yaitu jumlah penduduk yang tergolong dalam umur antara 15 tahun hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan suatu sumber daya yang tidak digunakan.<sup>12</sup> Jika tingkat pengangguran tinggi, maka sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Pada saat ini pemerintah semakin mengencangkan program pelatihan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, dan keterampilan agar masyarakat tersebut memiliki keahlian yang akan digunakan untuk mencari pekerjaan. Dengan program pelatihan kerja tersebut masyarakat dituntut untuk

---

<sup>11</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Makro Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hal 29.

<sup>12</sup> Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Depok:Kencana,2017), hal. 198.

mampu mengembangkan *skill* individu yang dimiliki agar mempunyai modal yang kuat untuk mencari kerja.<sup>13</sup>

**Tabel 1.5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur**  
**Tahun 2011 – 2018 (persen)**

Tahun	TPT
2011	4,16
2018	4,09
2013	4,30
2014	4,19
2015	4,47
2016	4,21
2017	4,00
2018	3,99

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Sekernas Agustus)*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur selalu mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2015 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur mencapai sebanyak 20,274 juta orang atau bertambah sebesar 124,69 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2014 sebesar 20,149 juta orang. Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,53 persen atau 19,37 juta. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,47 persen atau 906,90 ribu orang pada tahun 2015, relatif meningkat dibandingkan kondisi tahun 2014 yang mencapai 4,19 persen

---

<sup>13</sup> I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka, “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per Kapita, dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4 No. 5, 2015, hal. 547-548, dalam <https://ojs.unud.ac.id>, diakses 08 September 2019.

atau 843,49 ribu orang. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik.

Semakin banyak masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur, maka semakin banyak yang akan terjebak di dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.<sup>14</sup>

Berbagai strategi pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan mewujudkan melalui upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, namun dalam realitasnya masih terdapat diskrepansi antara harapan dan kenyataan di lapangan berupa kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses yang menyebar diseluruh wilayah baik di pedesaan maupun daerah perkotaan, seperti di desa kecil yang miskin, masyarakat di tepi pantai yang terisolir oleh hamparan laut, bahkan di perkotaan yang termasuk daerah kumuh seperti penduduk yang tinggal didaerah bantaran sungai, ataupun dipinggiran rel kereta api.

---

<sup>14</sup> Khomsan, *Indikator Kemiskinan*,(Jakarta:Fakulta Ekologi Manuia IPB, 2015), hal. 2.

Meskipun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,08 % melebihi Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,78 % namun provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar peringkat ke tiga sebesar 12,55 %, dengan proporsi penduduk miskin 4.805,01 jiwa.

Tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus diperuntukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Di banyak Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relative sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul “**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun dapat menghambat pembangunan di suatu daerah dan mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. IPM mengalami peningkatan dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan dan kesejahteraan meningkat tingkat kemiskinan menjadi berkurang.
3. Banyaknya jumlah pengangguran menyebabkan tingginya kemiskinan.
4. Kemiskinan dapat menyebabkan kelesuan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. **Secara Teoretis** : sebagai sumbangsih pemikiran terhadap kajian ilmu di bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Pembangunan.
2. **Secara Praktis** :
  - a. Bagi Lembaga : sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengambilan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- b. Bagi Akademik : sebagai sumbangsih perbendaharaan perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- c. Untuk penelitian selanjutnya : sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun variabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ( $X_2$ ), dan Pengangguran ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikat (Y) adalah Tingkat Kemiskinan.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tetapi juga meliputi terbatasnya variabel makroekonomi yang menjadi indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Pertumbuhan Ekonomi,

Indek Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran yang berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

## **G. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memberikan penegasan istilah mengenai judul tersebut sebagai berikut :

### **1. Secara Konseptual**

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Schumpeter sebagaimana dikutip oleh Iskandar, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya. Pertumbuhan ekonomi dapat

---

<sup>15</sup> Iskandar Putong dan ND Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hal. 141.

diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas kerja yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.

c. Pengangguran

Secara umum, pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan suatu sumber daya yang tidak digunakan. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang tidak bekerja, tetapi tidak

secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.<sup>16</sup> Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

d. Tingkat Kemiskinan

Menurut Triariani, kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), hal. 13.

<sup>17</sup> Endah Ernany Triariani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 5, 2013, dalam <http://journal.feb.unmul.ac.id>. diakses 8 September 2019.

## 2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ( $X_2$ ), dan Pengangguran ( $X_3$ ). Sedangkan variabel terikatnya adalah Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ).

## H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, variabel kedua, dan seterusnya, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

**3. BAB III****METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian; Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian; Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran; Teknik Pengumpulan Data; serta Analisis Data.

**4. BAB IV****HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari Hasil Penelitian yang berisi Deskripsi Data dan Pengujian Hipotesis serta Temuan Penelitian.

**5. BAB V****PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

**6. BAB VI****PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran yang diberikan penulis.